

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-013.10.2.409207/2019
I A. INFORMASI KINERJA**

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
Kode>Nama Satker : (409207) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI

Kuasa Pengguna Anggaran : S O F Y A N
Bendahara Pengeluaran : RINARTY NURWALIYAH
Pejabat Penanda tangan SPM : IR. ABD. RAHMAN L, M.H.

Halaman : IA . 1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN		1.634.109.000
Sub Fungsi	03.03	PEMBINAAN HUKUM		1.634.109.000
2 Program	013.10.12	Program Pembinaan Hukum Nasional		1.634.109.000
Sasaran Program	01	Terwujudnya Pembinaan Hukum		
Indikator Kinerja Program	01.01	Jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional	12 Rekomendasi	
	01.02	Jumlah RUU dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan Perpres yang sesuai dengan arah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional	20 RUU	
	01.03	Jumlah anggota JDIH yang memberikan layanan informasi hukum yang terintegrasi	25 JDIH	
	01.04	Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk di seluruh wilayah	175 Desa/Kelompok/Sekol	
	01.05	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum	6500 Orang	
Output Program	01	Pembinaan Hukum Nasional		
Indikator Output Program	01	Jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional	12 Rekomendasi	
	02	Jumlah RUU dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan Perpres yang sesuai dengan arah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional	20 RUU	
	03	Jumlah anggota JDIH yang memberikan layanan informasi hukum yang terintegrasi	25 JDIH	
	04	Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk di seluruh wilayah	175 Desa/Kelompok/Sekol	
	05	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum	6500 Orang	
	06	Layanan Internal Eselon I	1 Layanan	
Kegiatan	5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah		1.634.109.000
Sasaran Kegiatan	01	Terselenggaranya pembinaan hukum di seluruh wilayah		
Indikator Kinerja Kegiatan	01.01	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi		
	01.02	Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang atau Kelompok masyarakat miskin		
	01.03	Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah		
	01.04	Jumlah penyuluhan hukum di daerah		
	01.05	Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah		
	01.06	Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN		
	01.07	Terselenggaranya pelatihan/peningkatan kapasitas bagi OBH dan Paralegal (Tematik)		
Output Kegiatan	5256.001	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	131,00 Orang	1.048.000.000
	5256.001	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	690,00 Orang	1.048.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum Litigasi	5425 Orang/Kasus	
Output Kegiatan	5256.002	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	9,00 Kegiatan	96.030.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-013.10.2.409207/2019
I A. INFORMASI KINERJA**

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
Kode>Nama Satker : (409207) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI

Kuasa Pengguna Anggaran : S O F Y A N
Bendahara Pengeluaran : RINARTY NURWALIYAH
Pejabat Penanda tangan SPM : IR. ABD. RAHMAN L, M.H.

Halaman : IA . 2

Output Kegiatan	5256.002	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	9,00	Kegiatan	96.030.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Kegiatan Bantuan Non Litigasi kepada orang atau Kelompok Masyarakat Miskin	722	Kegiatan	
Output Kegiatan	5256.003	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum	1,00	Kantor Wilayah	81.857.000
	5256.003	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum	1,00	Kantor Wilayah	81.857.000
Indikator Output Kegiatan	01	Terselenggaranya Kegiatan Pelaksanaan Bantuan Hukum	33	Kantor Wilayah	
Output Kegiatan	5256.004	Penyuluhan Hukum dan Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Daerah	1,00	Kantor Wilayah	185.000.000
	5256.004	Penyuluhan Hukum dan Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Daerah	1,00	Kantor Wilayah	185.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Jumlah Penyuluhan Hukum di Daerah	33	Kantor Wilayah	
Output Kegiatan	5256.005	Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum di Daerah	1,00	Kantor Wilayah	98.811.000
	5256.005	Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum di Daerah	1,00	Kantor Wilayah	98.811.000
Indikator Output Kegiatan	01	Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	33	Kantor Wilayah	
Output Kegiatan	5256.006	Layanan Informasi Hukum melalui sistem JDIHN	1,00	Kantor Wilayah	98.811.000
	5256.006	Layanan Informasi Hukum melalui sistem JDIHN	1,00	Kantor Wilayah	98.811.000
Indikator Output Kegiatan	01	Terselenggaranya Layanan Informasi Hukum Melalui Sistem JDIHN	33	Kantor Wilayah	
Output Kegiatan	5256.007	Pelatihan/Peningkatan Kapasitas Bagi OBH dan Paralegal (Tematik)	50,00	Peserta Kegiatan	25.600.000
Indikator Output Kegiatan	01	Terselenggaranya kegiatan pelatihan/peningkatan kapasitas bagi OBH dan Paralegal (Tematik)	1650	Peserta	

Jakarta, 5 Desember 2018
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.

Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-013.10.2.409207/2019
I B. SUMBER DANA**

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
Kode>Nama Satker : (409207) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI

Halaman I B. 1

						Pagu	Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2019	Rp.	1.634.109.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	1.634.109.000			(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0			(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri		IDR	0		
6. SBSN	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR	0		
				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR	0		

2. Rincian Pinjaman / Hibah :

(Dalam Ribuan)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	RpLN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-013.10.2.409207/2019
II. RINCIAN PENGELUARAN
(RIBUAN RUPIAH)

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
Kode / Nama Satker : (409207) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI
Kewenangan : (KD)

Halaman II.1

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
409207	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI	-	1.620.909	13.200	-	-	1.634.109		
013.10.12	Program Pembinaan Hukum Nasional	-	1.620.909	13.200	-	-	1.634.109		
5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	-	1.620.909	13.200	-	-	1.634.109		
5256.001	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	-	1.048.000	-	-	-	1.048.000	20.51	
01	RM	-	1.048.000	-	-	-	1.048.000	060	
5256.002	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	-	96.030	-	-	-	96.030	20.51	
01	RM	-	96.030	-	-	-	96.030	060	
5256.003	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum	-	81.857	-	-	-	81.857	20.51	
01	RM	-	81.857	-	-	-	81.857	060	
5256.004	Penyuluhan Hukum dan Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Daerah	-	185.000	-	-	-	185.000	20.51	
01	RM	-	185.000	-	-	-	185.000	060	
5256.005	Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum di Daerah	-	98.811	-	-	-	98.811	20.51	
01	RM	-	98.811	-	-	-	98.811	060	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-013.10.2.409207/2019
II. RINCIAN PENGELUARAN
(RIBUAN RUPIAH)**

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
Kode / Nama Satker : (409207) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI
Kewenangan : (KD)

Halaman II.2

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5256.006	Layanan Informasi Hukum melalui sistem JDIHN	-	85.611	13.200	-	-	98.811	20.51	
01	RM	-	85.611	13.200	-	-	98.811	060	
5256.007	Pelatihan/Peningkatan Kapasitas Bagi OBH dan Paralegal (Tematik)	-	25.600	-	-	-	25.600	20.51	
01	RM	-	25.600	-	-	-	25.600	060	
	J U M L A H	-	1.620.909	13.200	-	-	1.634.109		

Jakarta, 5 Desember 2018
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.

Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-013.10.2.409207/2019
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
Kode dan Nama Satker : (409207) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI

Halaman : III.1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN DANA/PERKIRAAN PENERIMAAN												JUMLAH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	M E I	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	409207	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI													
		RENCANA PENARIKAN DANA	14.966	33.476	58.566	89.359	93.920	104.423	181.220	176.531	191.465	195.054	218.590	276.539	1.634.109
		52 BELANJA BARANG	14.912	33.067	58.029	88.826	93.364	103.738	180.083	175.220	189.971	193.861	217.040	272.798	1.620.909
		53 BELANJA MODAL	54	409	537	533	556	685	1.137	1.311	1.494	1.193	1.550	3.741	13.200
	013.10.12.5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	14.966	33.476	58.566	89.359	93.920	104.423	181.220	176.531	191.465	195.054	218.590	276.539	1.634.109
		52 BELANJA BARANG	14.912	33.067	58.029	88.826	93.364	103.738	180.083	175.220	189.971	193.861	217.040	272.798	1.620.909
		53 BELANJA MODAL	54	409	537	533	556	685	1.137	1.311	1.494	1.193	1.550	3.741	13.200

Jakarta, 05 Desember 2018
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.

Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-013.10.2.409207/2019
IV. A B L O K I R**

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
Kode dan Nama Satker : (409207) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI

Halaman : IV A.1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	U R A I A N	KODE	U R A I A N

Jakarta, 05 Desember 2018
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-013.10.2.409207/2019
IV. B C A T A N**

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
Kode dan Nama Satker : (409207) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI

Halaman : IV B.1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	U R A I A N	KODE	U R A I A N

Jakarta, 05 Desember 2018
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : SP DIPA-013.10.2.409207/2019**

A. Dasar :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No. xxxx Tahun xxxx tentang APBN TA xxxx (2) dan perubahannya

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran :

1. Kementerian Negara / Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
3. Provinsi : (20) SULAWESI TENGGARA
4. Kode>Nama Satker : (409207) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI
- Sebesar : Rp. 1.634.109.000 (SATU MILYAR ENAM RATUS TIGA PULUH EMPAT JUTA SERATUS SEMBILAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.10.12 Program Pembinaan Hukum Nasional
013.10.12.5256 Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah

Jumlah Uang

Rp.	1.634.109.000
Rp.	1.634.109.000

C. Sumber Dana Berasal :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 1.634.109.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBPNBPN TA Berjalan | Rp. | 0 | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN K E N D A R I (060) Rp. 1.634.109.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. Petikan DIPA ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk Badan Pembinaan Hukum Nasional, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Petikan DIPA ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman (digital stamp) sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. Petikan DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang tertuang dalam Petikan DIPA sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara Petikan DIPA dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. Petikan DIPA ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2XXX sampai dengan 31 Desember 2XXX.

DS: 5058-0850-0712-4040

Jakarta, 05 Desember 2018
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

STATUS VALIDASI CETAKAN

12-02-2020 09:54:12

Nomor SP : DIPA-013.09.2.409206/2019
Kode>Nama Satker : (409206) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI

	SATKER - PROGRAM - KEGIATAN - OUTPUT - AKUN - KETERANGAN
1	409206 Data KPA dan Alamat email tidak boleh kosong

Mohon data dikoreksi lebih lanjut sesuai dengan catatan validasi di atas.